

Putra Presiden AS Terancam Penjara 25 Tahun dalam Kasus Kepemilikan Senjata Api

NEW YORK (IM)—Putra Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Hunter, telah didakwa secara pidana dengan tiga tuduhan berbohong saat membeli senjata api, setelah kesepakatan pembelaan yang diusulkan gagal. Dakwaan tersebut menandai pertama kalinya anak seorang presiden yang menjabat diadili secara pidana.

Rencana tawar-menawar untuk menyelesaikan tuduhan terkait senjata dan pajak yang dia hadapi tiba-tiba gagal pada Juli lalu.

Ketiga dakwaan tersebut berkaitan dengan Biden, 53 tahun, yang diduga berbohong di formulir saat membeli senjata ketika dia menjadi pengguna narkoba.

Dikutip BBC, jaksa menuduh dia secara keliru menyatakan bahwa dia “bukan pengguna yang melanggar hukum dan kecanduan obat narkotika stimulan” ketika dia membeli pistol Colt Cobra Special di toko senjata Delaware pada Oktober 2018. Pada saat itu, Biden adalah pengguna berat kokain.

Berdasarkan undang-undang federal AS, berbohong pada dokumentasi semacam itu, atau memiliki senjata api saat menjadi pengguna narkoba merupakan suatu kejahatan.

Departemen kehakiman dalam sebuah pernyataan mengatakan jika terbukti bersalah, dia menghadapi hukuman maksimal 25 tahun penjara.

Hukuman sebenarnya untuk kejahatan federal biasanya kurang dari hukuman maksimum yang mungkin.

Masih belum jelas kapan dan di mana sidang pertama Biden akan berlangsung.

Pengacara Biden, Abbe Lowell, menyatakan bahwa dakwaan tersebut dipengaruhi oleh campur tangan Partai Republik yang tidak pantas dan partisan dalam proses ini.

Dia mengatakan kliennya “tidak melanggar hukum” dan bahwa kepemilikan senjata yang sudah dibongkar tidak pernah menjadi ancaman terhadap keselamatan publik.

“Tetapi seorang jaksa, dengan segala kekuasaannya, tunduk pada tekanan politik merupakan ancaman besar bagi sistem peradilan kita,” terangnya.

Profesor Sekolah Hukum Cornell, Randy Zellin, mengatakan kepada BBC bahwa dia yakin Biden kemungkinan besar tidak akan menjalani hukuman penjara dan kemungkinan besar akan ada kesepakatan pembelaan.

Pada Juni lalu, kesepakatan dua bagian dicapai antara jaksa dan tim hukum Biden,

yang kemudian gagal.

Berdasarkan ketentuan perjanjian itu, dia akan didakwa dengan dua tuduhan pelanggaran ringan karena gagal membayar pajak tepat waktu pada 2017 dan 2018.

Dia juga akan dipaksa untuk mengakui kepemilikan senjata api ilegal dan menyetujui perawatan dan pemantauan narkoba untuk menghindari tuduhan kejahatan dan kemungkinan hukuman penjara.

Namun Hakim Pengadilan Distrik AS Maryellen Noreika mengatakan dia tidak bisa menyetujui perjanjian tersebut, dan menambahkan bahwa usulan penyelesaian pelanggaran terkait senjata itu “tidak biasa”.

Tuduhan pada Kamis (14/9) ini adalah yang pertama yang diajukan oleh penasihat khusus Departemen Kehakiman Davis Weiss, yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Merrick Garland pada bulan Agustus.

Kantor Weiss sebelumnya mengatakan dia berusaha untuk mendakwa Biden pada 29 September.

Masalah hukum yang dialami Biden telah menjadi isu politik ketika ayahnya mencalonkan diri untuk dipilih kembali, meskipun ia tidak pernah memegang jabatan di Gedung Putih atau pemerintahan ayahnya.

Awal pekan ini, Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat AS mengumumkan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Biden.

Di antara tuduhan yang dilontarkan terhadap Biden adalah bahwa ia berbohong tentang keterlibatannya dalam urusan bisnis putranya saat menjabat sebagai wakil presiden pada 2009 – 2017.

Dua penyelidik pajak juga mengklaim departemen kehakiman menghalangi penyelidikan laporan pajak Hunter Biden. Departemen telah membantah klaim tersebut.

Di X, platform yang secara resmi dikenal sebagai ‘Twitter’, ketua Komite Pengawasan DPR James Comer – orang yang memimpin penyelidikan dakwaan – mengatakan dakwaan terhadap Hunter Biden adalah “permulaan yang sangat kecil”.

“Tetapi kecuali Jaksa AS Weiss menyelidiki semua orang yang terlibat dalam penjualan dan pembelian, akan jelas bahwa Departemen Kehakiman Presiden Biden melindungi Hunter Biden dan orang-orang besar,” terangnya. ● **gul**



IDN/ANTARA

ESTAFET OBOR ASIAN GAMES KE-19

Pembawa obor Gu Haohao berlari membawa obor saat estafet obor Asian Games ke-19 di Wenzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok, Jumat (15/9).

AS Sanksi Lima Perusahaan Turki karena Bantu Rusia

Lima perusahaan Turki ini diduga memberi dukungan ke Rusia dalam perang Ukraina.

WASHINGTON (IM)

Amerika Serikat (AS) menajutahkan sanksi terhadap lima perusahaan Turki dan seorang warga negara Turki pada Kamis (14/9). Mereka diduga membantu Rusia menghindari sanksi dan mendukung dalam perangnya melawan Ukraina.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller, Washington tidak khawatir bahwa sanksi yang dijatuhkan akan menggagalkan Stockholm tawaran untuk bergabung dengan aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). “Kami terus bekerja sama dengan mereka untuk mengkomunikasikan bahwa akses NATO penting bagi Swedia, hal ini harus terjadi sesegera mungkin, dan kami menerima jaminan dari Presiden Erdogan bahwa hal ini akan sangat bermanfaat,” kata Miller.

Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan mengatakan, menjatuhkan sanksi terhadap Margiana Insaat Dis Ticaret dan Demirci Bilisim Ticaret Sanayi. Lembaga itu mengatakan,

bahwa perusahaan-perusahaan yang berbasis di Turki termasuk di antara perusahaan-perusahaan yang diandalkan Rusia untuk mengimpor barang-barang serbaguna yang sangat dibutuhkan untuk memungkinkan terjadinya perang terhadap Ukraina.

Margiana Insaat Dis Ticaret telah melakukan ratusan pengiriman ke entitas Rusia yang terkena sanksi. Barang yang dikirimkan merupakan bagian dari rantai pasokan untuk memproduksi drone militer yang digunakan dalam perang Ukraina. Sementara Demirci Bilisim Ticaret Sanayi telah mengirimkan sensor dan alat ukur ke Rusia.

Departemen Luar Negeri AS menjatuhkan sanksi terhadap Konstruksi Kapal Denkar. Tindakan ini karena perusahaan itu menyediakan layanan perbaikan kapal kepada kapal-kapal yang sebelumnya ditunjuk oleh sebuah perusahaan yang terhubung dengan Kementerian Pertahanan Rusia.

AS juga menargetkan agen galangan kapal ID Ship Agency

yang berbasis di Turki dan pemiliknya Ilker Dogruyol serta CTL Limited. Menurut Departemen Luar Negeri merupakan perantara yang mengirimkan komponen elektronik asal AS dan Eropa ke perusahaan-perusahaan di Rusia.

Sanksi terbaru ini adalah bagian dari paket tindakan yang lebih besar. Dalam penetapan kali ini AS menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 150 sasaran, termasuk produsen mobil terbesar di Rusia.

Tindakan tersebut diambil pada saat yang sulit bagi hubungan AS-Turki. AS berharap Turki akan meratifikasi keanggotaan NATO untuk Swedia ketika parlemen Turki bersidang kembali pada awal Oktober.

“Kami tidak melihat hal ini ada hubungannya, dan kami tidak melihat bahwa sanksi ini akan berdampak sama sekali terhadap akses tersebut,” ujar Miller.

AS dan sekutunya menjatuhkan sanksi besar terhadap Rusia setelah invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Namun saluran pasokan dari negara tetangga di Laut Hitam, Turki, dan pusat perdagangan lainnya tetap terbuka.

Kondisi tersebut mendorong Washington untuk berulang kali mengeluarkan

peringatan mengenai ekspor bahan kimia, microchip, dan produk-produk lain yang dapat digunakan dalam upaya perang Moskow. Beberapa pejabat senior AS termasuk Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo telah melakukan perjalanan ke Turki sejak invasi Rusia ke Ukraina sebagai bagian dari kampanye tekanan untuk mencegah perusahaan Turki membantu Rusia menghindari pembatasan yang dilakukan AS.

“Selama 18 bulan terakhir, kami telah menyampaikan kekhawatiran kami kepada pemerintah Turki dan sektor swasta serta memberi tahu mereka tentang risiko signifikan berbisnis dengan pihak-pihak yang kami beri sanksi yang terkait dengan perang Rusia,” kata seorang pejabat senior Departemen Keuangan AS berbicara dengan syarat anonim.

“Penunjukan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan kami untuk menargetkan individu dan entitas yang memberikan dukungan material kepada entitas yang terkena sanksi,” ujar pejabat tersebut.

Paket sanksi yang lebih luas menargetkan basis industri Rusia, sektor maritim

dan pemasok teknologi, serta fasilitas yang memproduksi dan memperbaiki sistem persenjataan Rusia. Beberapa yang menjadi sasaran adalah produsen mobil terbesar Rusia, Avtovaz, sementara GAZ Group yang produsen otomotif lainnya terkena sanksi baru. AS juga menjatuhkan sanksi terhadap produsen tembaga lokal utama, Perusahaan Tembaga Rusia.

Sebuah jaringan yang berbasis di Finlandia yang mengkhususkan diri dalam pengiriman barang elektronik asing ke pengguna akhir yang berbasis di Rusia juga menjadi sasaran tindakan tersebut. Departemen Keuangan AS juga menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan logistik yang berbasis di Finlandia, Siberica Oy dan Luminor Oy, dengan tuduhan mengirimkan berbagai macam barang elektronik ke Rusia.

Sektor konstruksi Rusia, aliran pendapatan dari industri ekstraktif dan bank-bank yang berbasis di Rusia, perusahaan konsultan manajemen kekayaan, audit dan investasi juga terkena dampak dari aksi tersebut. Kedutaan Besar Rusia di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar. ● **tom**

Paspampres Korut Semprot Kursi Kim Jong Un Saat Ketemu Putin

MOSKOW (IM)

Pengawal keamanan atau paspampres untuk pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un tampak menyemprotkan cairan pada kursi yang akan diduduki pemimpin Pyongyang itu dalam pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pekan ini.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (15/9), rekaman video yang dipublikasikan oleh surat kabar Rusia, Kommersant, pada Kamis (14/9), menunjukkan seorang pengawal keamanan Korut yang mengenakan sarung tangan warna putih dengan hati-hati menyeka kursi warna hitam yang akan diduduki Kim Jong Un.

Pengawal keamanan itu juga menyemprotkan zat tak teridentifikasi, yang diduga disinfektan, ke sekeliling kursi tersebut.

Momen itu disebut berlangsung selama beberapa menit sebelum pertemuan Kim Jong Un dan Putin digelar.

Laporan Kommersant menyebut bahwa pengawal keamanan Korut itu menyemprot dan menyeka bagian bantalan kursi, pegangan tangan dan kaki kursi, bahkan area di sekitar kursi dengan disaksikan

oleh pengawal keamanan Kremlin yang tampak sedikit bingung dengan pemandangan itu.

Seorang pengawal keamanan Korut lainnya kemudian memberikan semacam perintah kepada pengawal yang sedang menyeka kursi Kim Jong Un untuk melakukan disinfeksi. Sifat perintahnya tidak diketahui secara jelas.

“Kursi tersebut ternyata menjadi perhatian terbesar pihak Korea Utara,” tulis koresponden surat kabar Kommersant, Andrei Kolesnikov.

Tampaknya, menurut laporan Kommersant, para pengawal keamanan Kim Jong Un -- yang jumlahnya mencapai 100 orang lebih -- tidak senang dengan kursi pertama dan kursi berikutnya yang disediakan oleh pihak Rusia.

Disebutkan Kommersant bahwa bentuk kedua kursi itu persis sama.

Kim Jong Un dan Putin melakukan pertemuan dan pembicaraan di wilayah Timur Jauh Rusia pada Rabu (13/9) waktu setempat, dengan membahas masalah militer, perang di Ukraina dan kemungkinan bantuan Rusia untuk program satelit Korut. ● **tom**

Saudi Hukum Mati Dua Tentara Atas Tuduhan Pengkhianatan Negara

SAUDI (IM)

Arab Saudi mengeksekusi mati dua orang tentara, satu di antaranya seorang pilot, karena dituduh melakukan pengkhianatan militer dan negara.

Kementerian Pertahanan Saudi menyebut dua tentara tersebut adalah Pilot Kolonel Majid bin Moussa al-Balawi dan Sersan Youssef bin Reda al-Azouzi. Keduanya ditangkap sejak September 2017.

Dilansir AFP, Kolonel al-Balawi dihukum karena dianggap melakukan pelanggaran militer dan gagal menjaga kepentingan negara.

Sementara Sersan al-Azouzi dihukum mati karena

melakukan pengkhianatan nasional dan militer tingkat tinggi, di samping dakwaan lainnya.

Kemhan Saudi tak merinci lebih lanjut tentang tuduhan yang mengakibatkan eksekusi mati atas kedua anggota militer itu. Keduanya dieksekusi di kota Taif, di bagian barat.

Eksekusi mati terhadap anggota militer jarang terjadi di Arab Saudi, terlebih negara Timur Tengah ini dikenal menjaga kerahasiaan soal hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan militer negara.

Saudi terakhir kali mengeksekusi tentara pada April 2021, terhadap tiga orang

yang juga dituduh melakukan pengkhianatan tingkat tinggi.

Menurut penghitungan AFP, Saudi sudah mengeksekusi mati 106 orang sepanjang tahun 2023. Tahun lalu, Saudi menghukum mati 147 orang, 81 di antaranya dieksekusi di hari yang sama karena kejahatan terkait terorisme,

Eksekusi massal semacam itu memicu kecaman dunia. Saudi menempati posisi ketiga sebagai negara dengan jumlah eksekusi tertinggi di dunia pada tahun 2022 oleh Amnesty International. Tiongkok dan Iran menempati urutan pertama dan kedua. ● **ans**



XINHUA

PEMAKAMAN KORBAN LEDAKAN DI PERBATASAN GAZA - ISRAEL

Orang-orang menghadiri pemakaman warga Palestina yang tewas dalam ledakan di perbatasan Gaza-Israel, di Kota Gaza, 14 September 2023. Setidaknya lima warga Palestina tewas pada Rabu dalam ledakan di perbatasan Israel-Gaza, Hamas-kata Kementerian Kesehatan di Gaza. Ledakan yang terjadi saat demonstrasi massal warga Palestina melukai 25 orang lainnya, tambahannya.

Dijuluki Kokain Orang Miskin, UEA Sita 13 Ton Pil Amfetamin Senilai Rp15 Triliun

DUBAI (IM)

Polisi di Uni Emirat Arab (UEA) telah menyita 13 ton pil amfetamin yang diselundupkan dalam furniture.

Obat yang dikenal sebagai Captagon senilai lebih dari USD1 miliar (Rp15 triliun) ini ditemukan setelah petugas diberitahu tentang kontainer pengiriman yang tampak mencurigakan.

Sebuah video menunjukkan polisi Dubai menghancurkan panel kayu dan pintu tempat 86 juta pil disembunyikan.

Dijuluki “kokain orang miskin”, Captagon dilaporkan sebagai salah satu narkoba paling populer di kalangan pemuda di Teluk.

Dikutip BBC, polisi tidak menyebutkan dugaan asal muasal pengiriman ilegal tersebut, namun Captagon diyakini diproduksi dalam jumlah besar di Suriah.

Pada puncak perang saudara di negara tersebut, kelompok bersenjata memasok obat tersebut kepada para pejuang – yang sangat membuat ketagihan dan sering kali dicampur dengan kafein – untuk meningkatkan

keberanian mereka.

Meningkatnya kemiskinan dikatakan telah memaksa banyak warga Suriah untuk terlibat dalam perdagangan ilegal Captagon, yang bernilai miliaran dolar.

Meskipun ada bantahan dari pemerintah Suriah, laporan mengaitkan tokoh-tokoh berpengaruh di dunia bisnis dan militer dengan pembuatan dan distribusi Captagon.

Polisi Dubai mengatakan mereka menyita lima kontainer pengiriman yang berisi 13 ton pil dalam sebuah operasi besar.

Rekaman video yang mereka rilis menunjukkan petugas melacak kontainer dan memantau tersangka, serta membongkar 651 pintu dan 432 panel kayu untuk mendapatkan narkoba tersebut.

Mayor Jenderal Eid Mohammed Thani Hareb, kepala departemen anti-narkoba kepolisian, mengatakan sebuah geng internasional berencana mengirimkan obat-obatan terlarang yang disembunyikan dalam kontainer ke UEA dan kemudian mengangkutnya ke negara lain.

Mesin X-ray dan unit anjing polisi membantu mengungkap hasil tangkapan tersebut.

Enam orang ditangkap dalam operasi tersebut. Hal ini diyakini sebagai salah satu tangkapan terbesar yang pernah dicegah.

Empat belas ton pil Captagon yang disembunyikan di drum kertas dan roda gigi disita di Italia pada 2020. Sedangkan pada tahun lalu, Arab Saudi menyita 46 juta pil amfetamin yang diselundupkan dalam pengiriman tepung. ● **tom**

PT Infinity Prima Nusantara ("Perseroan")
Pengumuman
Rencana Pengalihan Saham

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan bahwa pemegang saham Perseroan berencana untuk mengalihkan seluruh dan/atau sebagian besar hak kepemilikan atas saham Perseroan kepada pihak ketiga.

Pengalihan atas saham diatas merupakan pengalihan langsung dari pemegang saham sebagaimana diatur di dalam Pasal 125 ayat (1) UUPT.

Kreditor yang berkeberatan dengan rencana pengalihan saham-saham Perseroan tersebut diatas, bila ada, selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal Pengumuman ini dapat mengajukan keberatan secara tertulis berikut bukti-bukti yang sah kepada Direksi Perseroan, melalui alamat berikut ini:

PT Infinity Prima Nusantara
Alam: Gedung Arca Lt. 3,
Jl. RP. Soerono No. 40 BC, Kulkaraha Gondangdia,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
Jakarta, 16 September 2023
Direksi
PT Infinity Prima Nusantara